

STUDI LITERATUR : PERAN STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN POLA PERMUKIMAN

Boby Rahman¹⁾, Ega Selviyanti²⁾

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung Semarang^{1),2)}

Email Korespondensi : bobyrahman@unissula.ac.id

ABSTRACT

Socio and cultural system which believed as the result of relationship, communication, individual socialization in society has an effect on the form of the society's environmental order. The effect of relationship, communication and socialization which created a social system of society that makes the society divided into layers or positions based on believes values, norms and customs in society. This study uses literature study in reviewing the effect of social stratification with taking case study in Solo, Bali and Madura. The result of this study can be concluded that social stratification has a role in the formation of society settlements. That social stratification then forms a society environmental order in both spatial and physical architecture of buildings.

Keywords: *social stratification, settlements formation, settlement pattern*

ABSTRAK

Sistem sosial dan budaya yang dipercayai sebagai hasil hubungan, komunikasi, sosialisasi individu dalam masyarakat mempunyai pengaruh atas bentuk tatanan lingkungan masyarakat. Akibat dari hubungan, komunikasi dan sosialisasi dalam masyarakat sehingga terciptalah sistem sosial masyarakat yang menjadikan masyarakat terbagi dalam lapisan-lapisan atau kedudukan berdasarkan kepercayaan, nilai, norma dan adat istiadat dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literature dalam mengkaji pengaruh stratifikasi sosial, dengan mengambil studi kasus di Solo, Bali dan Madura. Hasil dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial mempunyai peran pembentukan permukiman masyarakat. Stratifikasi sosial tersebut kemudian membentuk tatanan lingkungan pola lapisan permukiman masyarakat baik yang bersifat spasial maupun fisik arsitektur bangunan..

Kata Kunci: *Stratifikasi Sosial, Pembentukan Permukiman, Pola Permukiman*

1. PENDAHULUAN

Lingkungan permukiman pada suatu wilayah secara universal terbentuk karena berbagai unsur, diantaranya adalah budaya masyarakat. Budaya atau kebudayaan masyarakat adalah keseluruhan sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang kemudian secara alami menjadikan identitasnya melalui proses belajar (Koentjaraningrat, 1992). Dasar budaya dalam masyarakat terbentuk dengan adanya komunikasi yang secara fisik dapat terlihat sebagai hasil dari aktifitas manusia yang dikenal sebagai pola tata ruang budaya (Rapoport, 1980) yaitu sebuah karya yang menggambarkan secara visual terhadap perilaku, serta symbol dan nilai yang muncul dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Bentuk fisik dan nilai yang merupakan hasil dari budaya yang terbentuk melalui sejarah panjang yang terjadi secara turun temurun dari beberapa generasi disebut sebagai warisan budaya (Karmadi, 2007). Warisan budaya berupa nilai, adat istiadat dan tradisi pada suatu daerah tertentu membentuk kultural spesifik yang berisi suatu karakter yang khas. Tradisi ini memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan yang kemudian mempengaruhi permukiman masyarakat itu sendiri.

Permukiman merupakan salah satu hasil yang terbentuk dari eksistensi sistem dan tata nilai yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan. Suatu permukiman masyarakat dapat terbentuk akibat pengelompokan profesi, ekonomi, hak dan kewajiban (Aliya, 2004) yang menjadi produk komunitas dan terbentuk secara alami dan berbeda satu dengan lainnya. Dalam permukiman terdapat istilah konsep kontekstual yang selaras untuk bertempat tinggal, dari konsep inilah muncul keinginan untuk tinggal dan menetap bersama dengan orang-orang sehingga membentuk unsur fisik spasial (berupa lokasi sebagai tempat tinggal) dan unsur non fisik (berupa kegiatan bermasyarakat yang membentuk kebiasaan dan adat istiadat masyarakat) dalam suatu wilayah yang di dalamnya terdapat tata kehidupan sosial budaya. Implikasinya, banyak permukiman yang terpengaruh oleh nilai dan perilaku budaya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga membentuk lokasi tertentu dan menjadi wujud ruang yang membentuk pola permukiman yang identik dengan sosial budaya masyarakat itu sendiri.

Permukiman dalam masyarakat senantiasa tersusun secara alami oleh masyarakat penghuninya berdasarkan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini menyiratkan bahwa permukiman merupakan salah satu buah hasil dari kebudayaan yang tersusun atas nilai, tradisi termasuk sistem strata sosial yang menjadi bagian dari kebudayaan itu sendiri.

Sehingga budaya memberikan pengaruh yang khas terhadap terbentuknya suatu permukiman, maka pada studi ini akan membahas Studi Literatur terkait pengaruh stratifikasi sosial masyarakat terhadap pola permukiman kota, berdasarkan analisis hasil kajian-kajian studi-studi literatur yang telah dilakukan. Pada studi ini akan dibahas dan dikaitkan dengan berbagai studi kasus yang terkait dengan pengaruh sosial budaya masyarakat terhadap pola permukiman kota. Sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ialah mengidentifikasi elemen pembentuk stratifikasi sosial sebagai salah satu warisan budaya, mengidentifikasi elemen stratifikasi sosial sebagai pembentuk permukiman masyarakat dan mengkaji bentuk pola permukiman masyarakat yang terbentuk akibat stratifikasi sosial sebagai warisan budaya.

2. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif, dengan pendekatan teknik analisis studi literatur. Studi literatur bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan pemahaman terhadap sebuah objek penelitian (Pusparinda dan Santoso, 2016). Pada Studi literatur para peneliti akan melakukan pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti (Kartiningrum, 2015). Menurut Danial dan Warsiah (2009) Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

Studi literature utama yang diambil dalam penelitian ini ada kajian studi yang berada di Kota Solo, Bali dan Madura. Alasan pemilihan ketiga lokasi studi tersebut dikarena kota Solo mewakili permukiman dengan stratifikasi jawa, Bali mewakili permukiman dengan stratifikasi Hindu dan Madura mewakili permukiman dengan stratifikasi muslim. Ketiga kategori tersebut (jawa, hindu, muslim) merupakan aspek sosial yang sangat kental dan dominan secara historis maupun pada kehidupan masyarakat Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sub bab ini akan menjelaskan mengenai pengaruh stratifikasi sosial terhadap pola permukiman masyarakat yang ditinjau dari studi kasus permasalahan yang telah dikaji sebelumnya. Adapaun studi kasus yang dikaji yaitu pengaruh stratifikasi sosial terhadap pola permukiman dengan studi kasus : Madura, Kota Kerjaan Surakarta dan Bali. Ketiga lokasi tersebut merupakan beberapa daerah dengan bentuk pola permukiman yang

dipengaruhi stratifikasi sosial atau lapisan sosial dalam masyarakat. Sehingga dari studi kasus tersebut akan dijelaskan apa elemen pembentuk stratifikasi sosial dalam masyarakat, stratifikasi sosial yang mempengaruhi pola permukiman hingga bentuk pola permukiman yang dipengaruhi oleh stratifikasi sosial itu sendiri.

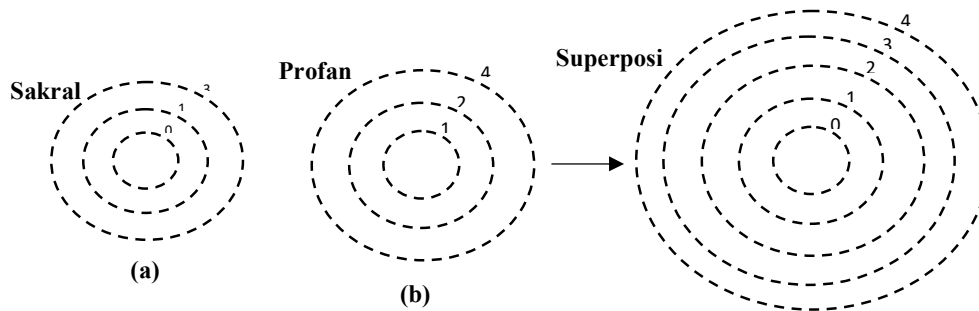
A. Konsep Mancapat-Mancalima Dalam Struktur Kota Kerajaan Mataram Islam Periode Kerajaan Pajang sampai dengan Surakarta

Kerajaan Mataram Islam, berdiri setelah kerajaan Demak berakhir. Seiring dengan pergantian penguasa, menyebabkan pusat kerajaan yang terus berpindah-pindah. Perpindahan pusat kerajaan masih menunjukkan unsur-unsur kerajaan Jawa pada umumnya berupa Keraton, Alun-alun, Masjid, Pasar, rumah-rumah bangsawan dan permukiman *abdi dalem*. Susunan elemen-elemen kota kerajaan tersebut didasarkan pada keyakinan kosmologi Jawa yang bersumber dari kepercayaan Hindu-Budha. Kepercayaan akan raja sebagai dewa menciptakan corak-corak sakral pada struktur kota kerajaan dengan puncak kekuasaan adalah raja.

Pemahaman masyarakat Jawa tradisonal tentang kota ialah suatu lingkungan berpagar atau tembok yang didalam lingkungan tersebut merupakan tempat tinggal pemimpin, para pejabat dan pegawai kerajaan yang disebut sebagai *kutha*. Namun, seiring perjalanan waktu terjadi perubahan akan makna *kutha* yaitu sebuah lingkungan tidak lagi harus ditutupi oleh pagar atau tembok tertentu. Penggambaran sebuah kota juga dapat dilihat dari morfologi dan bentuk fisik yang berlatar belakang budaya-sosial masyarakat. Pada kasus kota Surakarta misalnya, kerajaan Surakarta yang berdiri saat pemerintahan Hindia Belanda sehingga tumbuh dan berkembang dengan aneka budaya. Konsep *mancapat-mancalima* dalam struktur ruang kerajaan Mataram Islam, dapat dilihat dari latar belakang budayanya (Murtoyoso, 1993). Sehingga pembentukan struktur kota pada kota Surakarta sangat dipengaruhi oleh bentuk kerajaan Mataram Islam.

Elemen Stratifikasi Sosial sebagai bagian dari warisan budaya

Pada masa kota kerajaan Mataram Islam periode kerajaan Pajang sampai dengan Surakarta. Ruang tersebut terbagi menjadi dua ruang yaitu ruang profan dan ruang sakral yang didalamnya juga terdapat garis-garis imajiner yang memisahkan setiap ruang sebagai salah satu bentuk perwujudan lapisan sosial. Berikut adalah gambaran garis-garis imajiner yang terdapat pada masa kerajaan Mataram Islam menurut Santoso (1984):



Gambar 1. Lingkaran Tata Ruang Negara Mataram (c)
Sumber : Santoso, 1984

Lingkaran ruang sakral dalam sistem hirarki kerajaan Mataram Islam merupakan pusat sistem yang secara simbolik sebagai satu-satunya pusat bagi negara. Ruang sakral kerajaan Mataram Islam pada **gambar (a)** adalah lingkaran pusat *dalem* yang menjadi tempat tinggal raja dan negara agung, yaitu sebuah ruang yang tidak dapat dimasuki oleh semua orang. Hanya masyarakat dengan tingkatan sosial tertentu seperti keluarga raja, pejabat tinggi keraton dan *abdi dalem* kerajaan yang bekerja pada bidang tertentu serta pada lingkaran imajiner ketiga yang merupakan *negara agung* atau tanah yang suci yaitu tanah yang menjadi hak paten kepemilikan berada pada kerajaan dan merupakan tanah dengan status hak guna pakai.

Lingkaran ruang profan pada sistem kerajaan Mataram Islam terdiri atas tiga garis imajiner yang dianggap lebih duniawi. Lingkaran ruang profane ini meliputi lingkaran batas keraton, lingkaran batas negara atau birokrasi kerajaan dan lingkaran *mancanegara* yang merupakan lingkaran ruang diluar negara. Pada ruang profan raja dan keluarga raja, pejabat tinggi keraton, maupun *abdi dalem* dapat memasuki ruang tersebut. Sehingga dapat dilihat secara jelas bahwa pada ruang sakral tidak dapat dimasuki oleh semua orang sedangkan ruang profane dapat digunakan oleh semua orang dari berbagai tingkatan lapisan masyarakat.

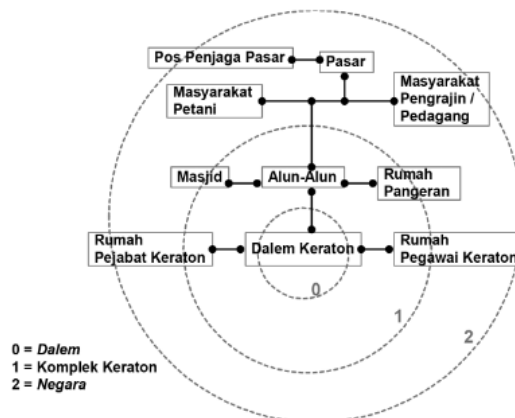
Stratifikasi Sosial sebagai warisan budaya yang membentuk Pola Permukiman

Masyarakat Jawa pada umumnya masih meyakini keraton sebagai pusat dan merupakan tempat tinggal Raja dan menjadikan sebagai kiblat dalam tata hidup dan tata nilai serta tata permukiman masyarakat. Tata permukiman masyarakat Jawa terdapat hirarki ruang sebagai manifestasi dari kedudukannya atau tingkatannya dalam masyarakat, misalnya keraton sebagai tempat tinggal raja menjadi pusat permukiman dengan tingkat tertinggi dan ruang-ruang lainnya membentuk lingkaran secara imajiner (melingkar mengikuti pusat) secara bertingkat sejalan dengan status dalam masyarakat. Semakin rendah status dalam masyarakat maka bertempat semakin luar dalam lingkaran imajiner

(semakin jauh dari pusat) (Junianto, 2016). Perjalanan panjang sejarah kerajaan Matarm Islam yang dimulai dengan berdirinya keraon Pajang di sebelah barat Surakarta, berpindah ke Kotagede hingga berpindah di Kartasura sistem kehidupan masyarakat menjadi berubah. Masyarakat yang semula dipimpin oleh seorang *Kiai*, berubah menjadi kerakaan dengan susunan hirarki dimana raja sebagai puncak tertinggi, diikuti lapisan bangsawan, *abdi dalem*, pengiring dan para *abdi*. Berdasarkan penelitian dari Junianto (2016), maka didapat tata pola permukiman kerajaan Pajang sampai dengan Surakarta:

a. Kerajaan Pajang

Kerajaan Pajang terletak pada sebelah barat wilayah kota Surakarta sekarang. Keraton pajang sebagai pusat tatanan kota Kerajaan dikelilingi oleh tembok sebagai pembatas ruang. Keraton Pajang sebagai ruang yang bersifat sakral meliputi istana kerajaan sebagai kediaman raja dan alun-alun. Disebelah kanan istana terdapat bangunan rumah tinggal pangawal istana dan serdau. Tatanan ini menunjukkan areal yang bersifat profan dan sakral. Tumenggung sebagai pimpinan pemerintahan atas anama raja, berada pada sebelah barat keraton. Tempat tinggal putra mahkota berlokasi di depan pasar. Unsur-unsur lain seperti kepatihan, pasar, pos pengawas pasar terletak disebelah alun-alun utara.

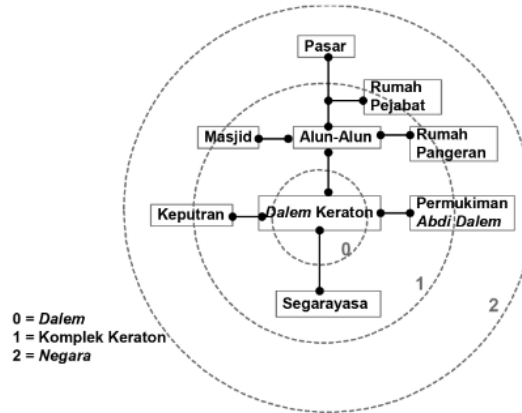


Gambar 2. Lingkaran Tata Ruang Kota Kerajaan Pajang
Sumber : Junianto 2016

b. Kerajaan Plered

Kerajaan Plered terletak sekitar 57 km sebelah timur Yogyakarta. Kerajaan Plered dikelilingi oleh tembok pagar kota dengan ketinggian 6-7 meter. Didalam tembok keraton terdapat istana raja dan rumah para pangerah yang terdapat pada sepanjang jalan pintu gerbang menuju istana kerajaan sebagai kediaman raja. Selain itu juga terdapat bangsal kaca, rumah jaga *Gedong Kemuning*, masjid keraton Suranata, *Gedong*

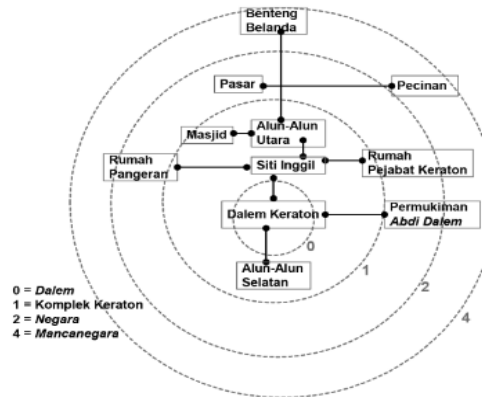
kedondong dan sumur *Guleng* tempat memandikan keris. Disebelah utara kompleks keraton terdapat alun-alun berukuran 300 x 400 meter dengan masjid disebelah baratnya dan di dalam kompleks masjid terdapat makam.



Gambar 3. Lingkaran Tata Ruang Kota Kerajaan Plered
Sumber : Junianto 2016

c. Kerajaan Kartasura

Sama dengan kerajaan sebelumnya, pusat kegiatan kerajaan Kartasura juga berada pada sekitar Keraton. Kerajaan Kartasura terletak dibagian barat luar kota Surakarta yang sekarang. Pada masa kerajaan Kartasura pihak-pihak asing seperti Belanda, Cina dan Arab mulai masuk dan mempengaruhi kerajaan. Pihak asing mulai membangun perkampungan masing-masing meskipun yang paling mempengaruhi Kartasura adalah Belanda. Pada masa kerajaan Kartasura terdapat alun-alun selatan sebagai pengganti Segarayasa (laut buatan). Segarayasa memiliki makna simbolis berupa sumber kehidupan dan bersifat profane. Alun-alun utara yang menyatu dengan masjid dianggap sebagai ruang sakral. Keraton memiliki dua orientasi, yaitu ruang yang bersifat sakral dan profan. Sebelah utara keraton lebih bersifat sakral dan sebelah selatan bersifat profan. Pada masa kerajaan Kartasura, tembok sebagai pembatas antar ruang sakral dan ruang profane serta sebagai garis jelas dari status dalam masyarakat kota kerajaan semakin nampak.

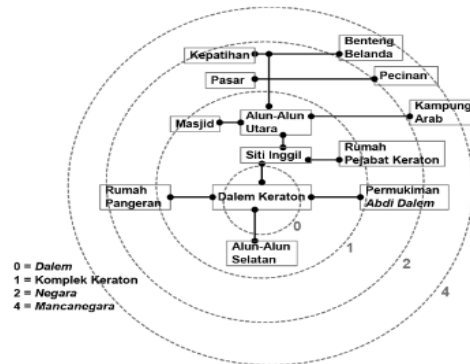


Gambar 4. Lingkaran Tata Ruang Kota Kerajaan Kartasura
Sumber : Junianto 2016

d. Kerajaan Surakarta

Seperti Kartasura, Kerajaan Suakarta juga memiliki dua alun-alun yaitu alun-alun utara dan alun-alun selatan yang masing-masing ditanamai dua buah pohon beringin pada pertengahan alun-alun dan komplek keraton berada diantara dua alun-alun tersebut. Pada bagian *dalem* keraton dipisahkan oleh tembok setinggi 3 meter dengan tembok keraton yang ke dua (benteng). Di dalam benteng terdapat keraton, *dalem* terpisah dengan bangunan keraton lainnya. Diantara tembok keraton yang pertama dan kedua terdapat hunian para pangeran yang bertugas dalam pemerintahan dan *abdi dalem*.

Komplek keraton beserta alun-alun menunjukkan ciribagian kota yang sakral. Permukiman orang asing yang beragama lain dan daerah eksteritorial seperti Mangkunegara dan 'kota Eropa' terdapat pada sebelah utara. Sehingga, daerah alun-alun Utara dianggap bersifat profane sedangkan daerah sebelah selatan bersifat sakral.



Gambar 5. Lingkaran Tata Ruang Kota Kerajaan Surakarta
Sumber : Junianto 2016

B. Pengaruh Sistem *Catur Wangsa* terhadap Perwujudan Tata Spatial Kota Peninggalan Kerajaan Hindu Di Bali: Kasus Kota Karangasem

Kota Karangasem merupakan salah satu kota peninggalan kerajaan Karangasem di Bali yang memiliki karakteristik spatial kota dan kehidupan masyarakat yang khas. Hal ini dipengaruhi oleh sistem sosial masyarakat yang terbagi menjadi beberapa golongan yaitu *catur wangsa* (kelompok sosial) yang selanjutnya mempengaruhi penampakan kota Karangasem secara fisik spatial.

Elemen Stratifikasi Sosial sebagai bagian dari warisan budaya

Kota Karangasem merupakan salah satu kota lama peninggalan kerajaan Hindu di Bali yang masyarakatnya telah terbagi menjadi beberapa golongan dengan strata sosialnya. Pembagian golongan atau kelompok tersebut didasarkan pada jenis pekerjaan, garis keturunan dan asal masyarakatnya. Pembagian golongan masyarakat tersebut salah satunya adalah *catur wangsa*.

Sistem *catur wangsa* mengelompokkan masyarakat menjadi empat golongan berdasarkan garis keturunan dan strata sosialnya dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh masuknya agama Hindu di Bali. Selain *catur wangsa*, masyarakat Bali juga mengenal *catur warna* dalam pengelompokan masyarakat. *Catur warna* terdiri dari dua kata yaitu, *catur* adalah empat dan *warna atau vri* yaitu memilih pekerjaan. Sehingga *catur warna* diartikan sebagai sistem pembagian masyarakat kedalam empat golongan berdasarkan konsep *dharma* atau *swadharma*, yaitu sesuai dengan kewajiban, bakat atau jenis pekerjaan.

Sedangkan *catur wangsa* atau *catur jatma* dipahami sebagai pembagian masyarakat menjadi empat kelompok berdasarkan *jati* (lahir), yaitu sesuai dengan garis keturunan atau kelahiran yang pada akhirnya menciptakan masyarakat dengan sistem kasta yang terkait dengan keturunan atau ras tertentu. Sistem Catur Wangsa, meliputi Triwangsa dan Non Triwangsa. Triwangsa terbagi menjadi Brahmana, Ksatria dan Wesya, sedangkan Non Triwangsa turun menjadi sudra.

Brahmana adalah golongan rohaniawan dan cendekiawan yang berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan dan turunannya. Golongan kedua adalah *ksatria* yang merupakan golongan pemimpin yang memiliki kewajiban dalam menjalankan pemerintahan dan militer serta turunan dari kedua hal tersebut. *Wesya* adalah golongan ketiga berupa golongan pedagang yang memiliki wewenang dalam perdagangan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan golongan terakhir adalah *sudra* yang merupakan kelompok masyarakat dengan golongan terendah sebagai pekerja.

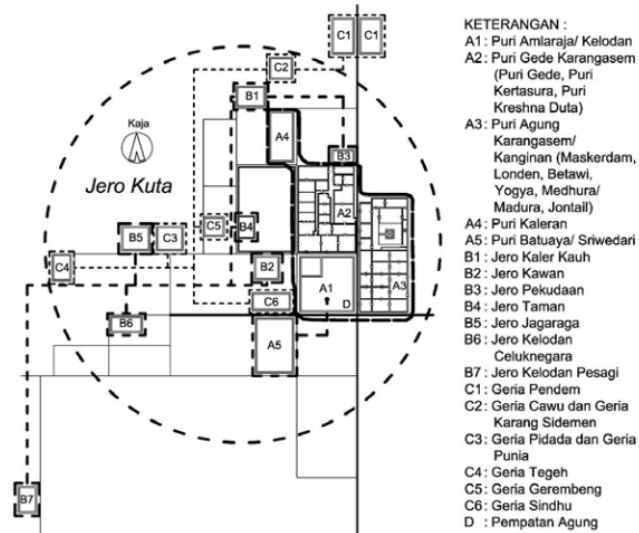
Stratifikasi Sosial sebagai warisan budaya yang membentuk Pola Permukiman

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa masyarakat Bali membagi masyarakatnya ke dalam 4 kelompok masyarakat yang disebut sebagai *catur wangsa*. *Catur wangsa* terdiri atas kelompok *brahmana*, *kstarya*, *wesya* dan *sudra*. Tiap kelompok masyarakat tersebut kemudian memiliki bentuk hunian yang khusus sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam masyarakat. Kelompok *brahmana* sebagai kelompok masyarakat tingkat pertama memiliki hunian yang disebut *geria*. *Puri* adalah isana bagi raja dan keluarganya yang merupakan golongan *ksatria* sedangkan *penggawa* atau masyarakat dengan darah biru (bangsawan) yang tidak memegang kekuasaan dan keluarganya tinggal dalam hunian yang disebut *jero*. *Umah* atau rumah adalah hunian bagi golongan *sudra*.

Masing-masing hunian tersebut juga terbagi atas kelompok-kelompok ruang dengan pembedaan ruang sakral dan ruang profan yang juga diartikan sebagai tingkat kesucian setiap ruang.

- (a) *puri* memiliki nilai utama yaitu ruang dengan tingkat yang paling suci atau sakral. Sebagai ruang yang memiliki tingkat utama, *puri* memiliki pekarangan yang luas dan terletak pada *penempatan agung* yang dianggap sebagai simpang sakral dan pusat dunia, sehingga menjadi pusat kota Karangasem. Dalam wilayah Kota Karangasem, terdapat empat *puri* yang terletak di sekitar areal *catuspatha*, yaitu (1) Puri Amlaraja atau Puri Kelodan di sebelah *kaja kauh* (barat laut) *catuspatha*; (2) Puri Gede Karangasem di sebelah *kaja* (utara) Puri Kelodan; (3) Puri Agung Karangasem atau Puri Kanginan di sebelah *kaja kangin* (timur laut) *catuspatha*; dan (4) Puri Kaleran di sebelah *kaja* (utara) Puri Gede Karangasem. Hal ini memperlihatkan bahwa seluruh *puri* di Kota Karangasem terletak di sebelah *kaja* (utara) *catuspatha* yang merupakan areal *hulu*, dan terletak di areal pusat kota sebagai areal *utama* Kota Karangasem.
- (b) *geria* dan *jero* bernilai madya yaitu ruang yang berada diantara suci dan nista. *Jero* sebagai hunian bagi *penggawa* atau bangsawan yang tidak memegang kekuasaan *jero* terletak pada sekitar areal *puri* karena merupakan perluasan dari *puri* karena masih dalam bagian keluarga raja. Dalam wilayah Kota Karangasem, terdapat tujuh *jero* di sekitar kawasan *puri*, yaitu (1) *Jero Kaler Kauh*; (2) *Jero Pekudaan*; (3) *Jero Taman*; (4) *Jero Kawan*; (5) *Jero Jagaraga*; (6) *Jero Kelodan Pesagi*; dan (7) *Jero Kelodan Celuknegara*. *Geria* merupakan hunian *brahmana* dengan pekarangan yang lebih kecil dibandingkan dengan *puri* dan terletak pada sekitar kawasan *puri* hal ini dikarenakan

pada zaman dulu *brahmanan* bertugas sebagai penasihat raja dan penanggung jawab berbagai ritual keagamaan. *Geria* yang terdapat pada kota Karangasem antara lain (1) Geria Pendem; (2) Geria Pidada; (3) Geria Karang Sidemen; (4) Geria Cawu; (5) Geria Punia; (6) Geria Tegeh; (7) Geria Sindhu; dan (8) Geria Gerembeng. Berikut adalah tatanan lokasi *puri*, *geria* dan *jero* pada Kota Karangasem:



Gambar 6. Tata Letak Puri, Jerod dan Geria

Sumber : Hardy, dkk 2015

(3) *umah* bernilai nista yaitu ruang yang berada paling luar dan bernilai tidak suci yang terletak pada pinggiran atau luar kota. Hunian masyarakat tersebut juga membentuk kelompok-kelompok hunian sendiri, yaitu hunian yang berbentuk *umah-banjarr pakraman* untuk masyarakat kelompok *sudra* dan rumah kampung untuk masyarakat dengan golongan yang berada diluar golongan tersebut (pendatang) terutama yang berasal dari Lombok dan Jawa membentuk hunian.

Berdasarkan penjelasan dapat diketahui bahwa terdapat kesesuaian konsep *trimandala* dalam konsep hunian *triwangsa* yang kemudian membagi kota Karangasem menjadi 3 *mandala* berdasarkan hirarkinya, yaitu:

1. *Utama mandala*

Merupakan wilayah pusat kota yang ditandai dengan keberadaan *puri* sebagai hunian dengan nilai utama.

2. *Madya mandala*

ialah wilayah sekitar pusat kota yang ditandai dengan keberadaan *jero* dan *geria* sebagai hunian dengan nilai madya atau tengah.

3. *Nista mandala*

Merupakan wilayah yang berada pada pinggiran kota yang ditandai dengan keberadaan *umah-banjar pakraman* dan rumah-kampung.



Gambar 7. Tata Hunian Masyarakat Karangasem berdasarkan *Trimandala*

Sumber : Hardy, dkk 2015

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem *catur wangsa* memiliki pengaruh terhadap perwujudan tata spatian Kota Karangasem. Statifikasi sosial masyarakat dimanifestasikan kedalam ketiga lapisan ruang yang menunjukkan ruang *utama*, *madya* dan *nista*.

C. Kajian Desain Lanskap Permukiman Tradisional Madura

Masyarakat Madura termasuk dalam masyarakat yang menganut hubungan hubungan kekerabatan yang memperhitungkan atau mengikuti garis keturunan laki-laki dan perempuan secara sama dan setara sehingga tidak ada perbedaan antara keluarga laki-laki dan perempuan (Rifa'i, 2007). Namun, keterkaitan dalam keluarga sangat besar, hal ini dapat terlihat dalam penataan permukiman masyarakat Madura.

Masyarakat Madura yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam menjadikan pola sika dan perilaku masyarakat Madura didasarkan pada keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu sistem stratifikasi sosial, harga diri yang melekat kuat serta sistem kekerabatan yang menjadi dasar dan landasan perilaku masyarakat Madura (Wiyata, 2002).

Elemen Stratifikasi Sosial sebagai bagian dari warisan budaya

Secara garis besar pelapisan sosial meliputi tiga lapisan yaitu *oreng kene* sebagai lapisan terbawah, *ponggaba* sebagai lapisan menengah, dan *parjaji* sebagai lapisan paling atas (Wiyata 2002). *Oreng kene* atau orang kecil adalah kelompok masyarakat biasa atau kebanyakan. Mereka biasanya bekerja sebagai petani, nelayan, atau pengrajin. Lapisan sosial menengah atau *ponggaba* meliputi para pegawai yang bekerja sebagai birokrat mulai dari tingkat bawah hingga tinggi. Lapisan paling atas atau *parjaji* adalah para bangsawan baik yang merupakan keturunan raja maupun keturunan orang-orang yang diberi penghargaan oleh pemerintah kolonial.

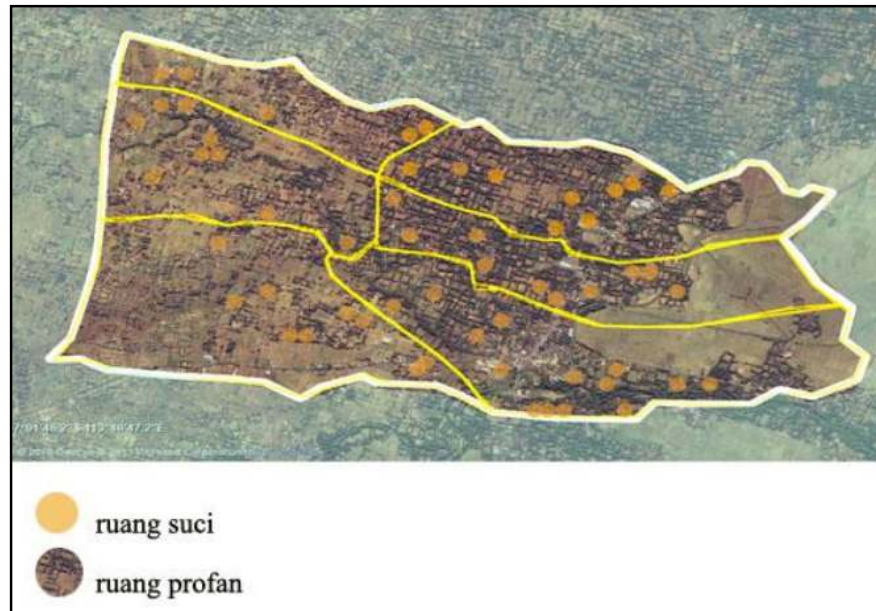
Selain itu, juga terdapat pelapisan sosial masyarakat Madura menurut dimensi agama yang terbagi menjadi dua lapisan yaitu *santrree* dan *bene santrre*. Kelompok santri dibedakan menjadi tiga tingkatan, *Kyai* merupakan kelompok masyarakat yang berada pada lapisan atas, *bindara* dianggap sebagai kelompok masyarakat menengah dan *santri* sebagai kelompok masyarakat pada lapisan terbawah. Pada wilayah pedesaan Madura, pelapisan sosial berdasarkan dimensi agama lebih diutamakan sehingga seorang *Kyai* yang bertugas sebagai guru akan lebih didengar dan ditaati perintahnya dan nasihatnya dibandingkan dengan pengusaha daerah.

Stratifikasi Sosial sebagai warisan budaya yang membentuk Pola Permukiman

Permukiman masyarakat Madura selain dipengaruhi oleh lapisan sosial dalam masyarakat, permukiman tradisional Madura juga dipengaruhi oleh mata pencaharian penduduknya yang sebagian besar adalah petani lahan kering sehingga bentuk pola permukiman masyarakatnya mengelompok namun berpencar. Setiap keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan cenderung hidup berkelompok namun terpisah oleh lahan pertanian sehingga terlihat berpencar.

Kedudukan seorang *Kyai* sebagai guru serta panutan dalam masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat Madura akan musibah yang terjadi jika melawan atau bertentangan dengan ajaran *Kyai* menjadikan masjid dan pesantren sebagai pusat pelayanan dan aktivitas sosial masyarakat. Letak masjid dan pondok pesantren ini pada umumnya berada pada jalur sirkulasi primer.

Menurut dimensi kepercayaan masyarakat Madura, ruang permukiman masyarakat Madura terbagi atas dua ruang, yaitu ruang profan dan ruang sakral.



Gambar 8. Tata Ruang menurut Kepercayaan
Sumber ; Maningtyas dkk, 2013

Ruang profan sebagai ruang yang bersifat duniawi sehingga aktivitas dilakukan oleh masyarakat Madura pada ruang tersebut ialah aktivitas sosial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan hubungan dengan sesama manusia. Sedangkan ruang sakral sebagai ruang yang bersifat suci atau spiritual sehingga aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Madura pada ruang sakral ialah aktivitas bersifat keagamaan dan pelaksanaan dengan kepercayaan yang termasuk didalamnya ialah masjid, rumah dan pemakaman. Sedangkan ruang profan adalah lahan pertanian.

Ruang perumukiman masyarakat Madura terbentuk oleh budaya masyarakat yang memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem kepercayaan masyarakat dan kekerabatan masyarakat. Pelapisan sosial yang menurut dimensi agama yang membagi masyarakat kedalam tiga kelompok *kyai*, *santri* dan *bene santri*. *Kyai* sebagai golongan tertinggi memegang peranan penting dalam masyarakat yaitu sebagai guru yang memberikan ilmu pengetahuan, ilmu agama dan teladan bagi masyarakat sehingga *Kyai* sangat dihormati. Hal ini yang menjadikan permukiman golongan *kyai* merupakan pusat aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan proses belajar.

Perbandingan Studi Kasus

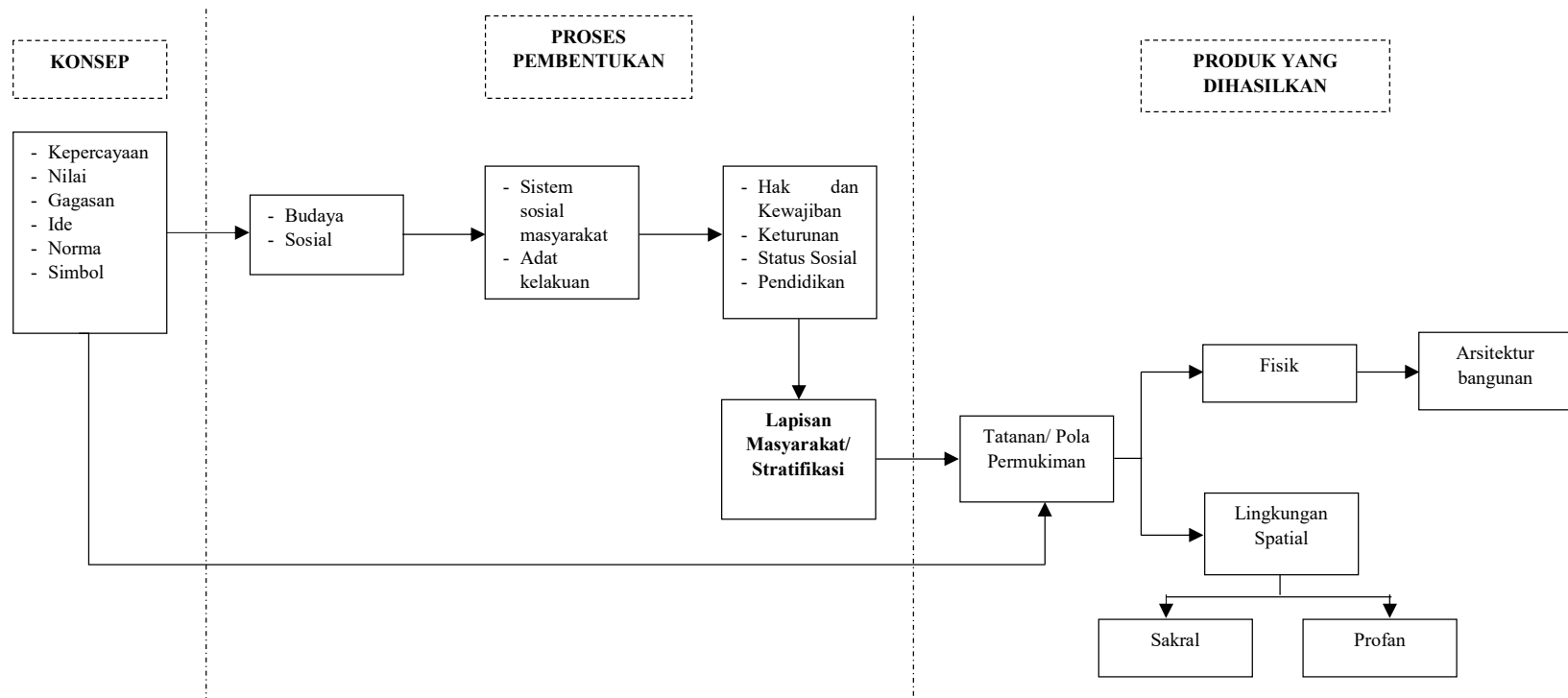
Berdasarkan penjelasan tersebut berikut adalah temuan berdasarkan studi kasusu yang dijabarkan:

Tabel 1 Perbandingan Studi Kasus Pengaruh Stratifikasi Sosial terhadap Pembentukan Pola Permukiman

No.	Sasaran	Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Pola Permukiman Masyarakat		
		Pembentukan Pola Permukiman Kerajaan Pajang sampai dengan Surakarta	Pembentukan Pola Permukiman Kota Karangasem	Pembentukan Pola Permukiman Madura
1.	Elemen pembentuk stratifikasi sosial sebagai salah satu warisan budaya	<p>Stratifikasi sosial atau lapisan sosial yang ada pada masa Kerajaan Pajang sampai dengan Surakarta terbagi menjadi 4 lapisan masyarakat yang tertinggi sampai dengan yang terendah yaitu raja, bangsawan, <i>abdi dalem</i> dan masyarakat biasa.</p> <p>Lapisan sosial pada masa kerajaan Pajang sampai dengan Surakarta sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan yang artinya status atau kelas sosial seseorang dapat diturunkan secara langsung sebaga keturunan dari seseorang. Seorang raja yang mempunyai seorang anak, maka secara otomatis anak tersebut akan menjadi keluarga raja dan berada pada lapisan sosial tertinggi.</p> <p>Selain itu, lapisan sosial pada masa itu juga dapat dipengaruhi oleh profesi. <i>Abdi dalem</i>, sebagai pekerja kerajaan merupakan sebuah profesi yang tidak diturunkan pada keturunannya. Seseorang dapat menjadi seorang <i>abdi dalem</i> berdasarkan gerakan hati sebagai bentuk pengabdian kepada kerajaan yang dipercayai merupakan pusat dari kehidupan.</p>	<p>Stratifikasi sosial atau lapisan sosial yang ada pada Kota Karangasem sebagai salah satu kota peninggalan Kerajaan Hindu di Bali terbagi menjadi 4 lapisan masyarakat yaitu <i>brahmana</i>, <i>ksatrya</i>, <i>wesya</i> dan <i>sudra</i> yang disebut sebagai <i>catur wangsa</i>. Merupakan pembagian masyarakat menjadi empat golongan berdasarkan konsep <i>jati</i> yaitu sesuai dengan garis keturunan atau kelahiran, kewajiban bakat atau pekerjaan.</p>	<p>Stratifikasi sosial atau lapisan sosial yang terdapat di Madura terbagi menjadi 3 lapisan masyarakat yaitu <i>Kyai</i>, <i>Santree</i> dan <i>Bane santree</i>. Pembagian masyarakat kedalam tiga lapisan tersebut berdasarkan kepercayaan masyarakat Madura yang kental terhadap agama yang dianut yaitu agama Islam.</p>

No.	Sasaran	Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Pola Permukiman Masyarakat		
		Pembentukan Pola Permukiman Kerajaan Pajang sampai dengan Surakarta	Pembentukan Pola Permukiman Kota Karangasem	Pembentukan Pola Permukiman Madura
2.	Stratifikasi sosial sebagai pembentuk permukiman masyarakat	<p>Stratifikasi sosial yang mempengaruhi permukiman masyarakat menjadikan bentuk pola atau tatanan permukiman masyarakat pada zaman kerajaan Pajang sampai dengan Surakarta sebagai berikut:</p> <p>Pola permukiman masyarakat yang memusat dan membentuk lingkaran imajiner dengan keraton sebagai pusat dari permukiman yang merupakan tempat tinggal raja dan keluarganya yang menduduki tingkatan lapisan tertinggi. Kemudian bangsawan dan <i>abdi</i> dalam yang menepati lapisan kedua serta masyarakat biasa yang menempati lapisan terakhir</p>	<p>Stratifikasi sosial yang mempengaruhi permukiman masyarakat menjadikan bentuk pola atau tatanan permukiman masyarakat di Kota Karangasem sebagai berikut:</p> <p>Pola permukiman kota Karangasem yang dipengaruhi oleh stratifikasi atau lapisan sosial masyarakat menjadikan kota Karangasem terbagi atas 3 ruang yaitu ruang <i>utama</i> sebagai pusat dan tempat tinggal kaum <i>ksatria</i>, ruang <i>madya</i> sebagai tempat tinggal kaum <i>brahmana</i> dan ruang <i>nista</i> sebagai tempat tinggal kaum <i>sudra</i> yang merupakan lapisan masyarakat terendah.</p>	<p>Stratifikasi sosial yang mempengaruhi permukiman masyarakat menjadikan bentuk pola atau tatanan permukiman masyarakat di Madura sebagai berikut:</p> <p>Pola permukiman Madura yang dipengaruhi oleh stratifikasi sosial dalam masyarakat menjadikan pola permukiman yang memusat dengan pusat lingkungan adalah masjid atau pondok. Hal ini dikarenakan akan kepercayaan dan <i>Kyai</i> sebagai lapisan masyarakat tertinggi sebagai pusat permukiman.</p>

Sumber : Hasil Analisis, 2017



Gambar 9. Analisis Peran Stratifikasi Sosial terhadap Pembentukan Pola Permukiman
Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2017

Stratifikasi sosial atau lapisan sosial merupakan salah satu hasil dari kebudayaan yang berkembang dan dipertahankan oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu. Pembentukan permukiman masyarakat oleh stratifikasi atau lapisan masyarakat dapat dijabarkan kedalam tiga proses yaitu konsep, proses dan produk. Konsep pada pembentukan permukiman yang dipegaruhi oleh stratifikasi sosial merupakan landasan dari terbentuknya stratifikasi sosial dalam masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Koentjaraningrat bahwa kebudayaan tersusun atas unsur keagamaan atau kepercayaan, ide, gagasan, norma dan simbol. Unsur-unsur tersebut kebudayaan membentuk sosial budaya masyarakat yang menjadi proses terbentuknya lapisan masyarakat. Yaitu sosial masyarakat menciptakan sistem sosial dalam masyarakat dan budaya menciptakan adat kelakuan masyarakat.

Terbentuknya sistem sosial dalam masyarakat, secara langsung akan membedakan hak dan kewajiban serta kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat yang dijelaskan oleh Zainuddin Ali (2007) yaitu akan terdapat letak tidak seimbangan terhadap dua hal tersebut yang berpengaruh kepada manusia sebagai anggota masyarakat. Perbedaan dan ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban serta kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang kemudian membentuk lapisan-lapisan dalam masyarakat. Masyarakat yang berada pada lapisan atas cenderung memiliki tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban dalam mengurus wilayah, pemerintahan dan masyarakat secara menyeluruh hal ini dapat dilihat pada ke tiga studi kasus. Di Bali misalnya *brahmana* sebagai kelompok masyarakat yang berada pada lapisan atas berkewajiban mengembangkan ilmu dan pengetahuan dan *ksatria* yang memiliki kewajiban dalam menjalankan pemerintahan dan militer.

Perbedaan tersebut kemudian membentuk tatanan permukiman masyarakat. Masyarakat dengan kedudukan tertinggi atau berada pada lapisan inti/pusat dalam masyarakat akan membentuk tatanan permukiman yang tidak dapat dimasuki oleh semua lapisan masyarakat yang menjadi ruang sakral dalam tatanan permukiman. Sedangkan masyarakat yang berada pada lapisan yang lebih rendah juga akan membentuk ruang kegiatannya yaitu ruang profan yang cenderung dapat dimasuki oleh semua lapisan dalam masyarakat. Hal ini terlihat jelas dalam pembentukan struktur kota Kerajaan Mataram Islam sampai dengan Surakarta yang menjelaskan secara jelas bahwa lapisan masyarakat membentuk tatanan permukiman masyarakat secara bertingkat dengan *dalem* yang merupakan tempat tinggal raja dan keluarganya sebagai inti dari tatanan permukiman.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implikasinya, banyak permukiman yang terpengaruh oleh nilai dan perilaku budaya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga membentuk lokasi tertentu dan menjadi wujud ruang yang membentuk pola permukiman yang identik dengan sosial budaya masyarakat itu sendiri.

Sehingga berdasarkan pembahasan dan hasil kajian tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Elemen-elemen pembentuk stratifikasi atau lapisan sosial dalam masyarakat berupa keturunan sebagai elemen yang paling berpengaruh terhadap kelas sosial masyarakat, kemudian terdapat elemen profesi dan bakat.
2. Stratifikasi sosial sebagai salah satu warisan budaya masyarakat berpengaruh terhadap pembentukan permukiman masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan yang kuat dan tradisi masyarakat menyusun ruang permukiman kedalam konsepsi lapisan ruang sakral dan ruang profan.
3. Pola permukiman yang terbentuk atas pengaruh stratifikasi sosial atau lapisan sosial dalam masyarakat cenderung memusat dan membentuk ruang-ruang imajiner berdasarkan kelas atau status sosial dalam masyarakat.
4. Masyarakat dengan tingkat atau kelas sosial tertinggi berada pada pusat permukiman masyarakat dan masyarakat dengan lapisan berikutnya mengikuti tingkat tertinggi tersebut.

Saran

Dalam pengembangan kawasan, tata ruang sebaiknya memperhatikan warisan budaya sebagai karakter suatu kawasan. Hal ini sangat penting guna arah pengembangan tata ruang yang minim konflik serta tepat sasaran dari aspek ruang budaya (konsepsi lapisan ruang sakral dan ruang profan), sesuai dengan pola pengembangan kebutuhan (ruang-ruang imajiner) dan ruang ekspresi bagi masyarakat. Kekhasan yang muncul dari lapisan stratifikasi sosial, dapat memberikan nilai tambah kawasan dan peningkatan ekonomi, hal ini sejalan bila dipadukan dengan aktivitas wisata budaya yang terus berkembang dan semakin diminati.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, I. (2004). Identifikasi Kampung Kemlayan sebagai Kampung Tradisional Jawa di Pusat Kota. *Jurnal Teknik*. 11 (1), 33 – 40.
- Danial, Endang. & Nanan, Warsiah. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboraturium Pendidikan Kewarganegaraan
- Hardy, I. G. N. W., Setiawan, B., & Prayitno, B. (2016). Pengaruh Sistem Catur Wangsa terhadap Perwujudan Tata Spasial Kota Peninggalan Kerajaan Hindu di Bali: Kasus Kota Karangasem. *Journal of Bali Studies*, 6(2), 79-96.
- Junianto. (2016). Konsep Mancapat-Mancalima Dalam Struktur Kota Kerajaan Mataram Islam Periode Kerajaan Pajang Sampai Dengan Surakarta. Dalam Seminar Nasional Space #3 *Membangkit Multikultural dan Kearifan Lokal Melalui Perencanaan Wilayah dan Kota*. 3 (1), 234-253.
- Karmadi, A. D. (2007). Budaya Lokal Sebagai Warisan Budaya dan Upaya Pelestariannya. Makalah disampaikan pada Dialog Budaya Daerah Jawa Tengah. Semarang : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
- Koentjaraningrat. (1992). *Kebudayaan Mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kartiningrum, Eka, Diah. (2015). Panduan Penyusunan Studi Literatur. Mojokerto : Politeknik Kesehatan Majapahit
- Maningtyas, R., T. (2013). Kajian Desain Lanskap er mukiman Tradisional Madura. Skripsi. Bogor : Sekolah Institiut Pertanian Bogor
- Murtoyoso, S. (1993) Sejarah Arsitektur Kota di Kawasan Budaya Pesisir. Surabaya: Seminar Pelestarian Arsitektur Kota
- Pusparinda, Laela. & Santoso, R., I., B. (2016). Studi Literatur Perencanaan *Floating Treatment Wetland* di Indonesia. *Jurnal Teknik ITS*. 5 (2) A475-1-A475
- Rapoport, Amos. (1980). Pengantar Arsitektur. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Rifa'i, Mien Ahmad. (2007). Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya. Yogyakarta: Pilar Media
- Santoso, J. (1984). Konsep Struktur dan Bentuk Kota Jawa s/d Abad XVII. Bandung. Institut Teknologi Bandung

Wiyata, Latief. (2002). *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS.

Ali, Z. (2007). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.